

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan sudah dilakukan di seluruh daerah sekolah yang tidak lepas dari pedoman belajar yang diberikan disetiap satuan lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan memiliki rencana dan bahan ajar tersendiri yang menyesuaikan standart operasi sekolah sebagai lembaga satuan pendidik. Perangkat rancangan pembelajaran yang digunakan berupa kurikulum pendidikan dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Isi dari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 pasal 1 ayat 13 membahas tentang “Kurikulum sebagai alat untuk membuat aturan mengenai isi, tujuan dan bahan pembelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan pendidikan”. Sistem pendidikan pada daerah daerah memiliki urgensi tersendiri dengan melihat kebutuhan dan tetap meninjau dari dasar peraturan daerah yang berfokus pada kebijakan kurikulum yang dibuat oleh menteri pendidikan.

Pengertian sistem pendidikan nasional dalam UU No 20 Tahun 2003 sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 ayat 3 adalah semua bagian pendidikan yang saling terhubung secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagai sistem, semua bagian yang ada di dalam harus memahami bagian yang saling terhubung untuk mencapai tujuan pendidikan

nasional (Rahman et al., 2021). Standar nasional pendidikan mengacu pada proses belajar mengajar yang menjadi fokus utama untuk reformasi pendidikan di Indonesia sebagaimana sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional yang membahas kurikulum sebagai bentuk kegiatan yang direncanakan untuk mengatur tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan.

Sistem pendidikan saat ini sudah menggunakan kurikulum terbaru dengan menyesuaikan perkembangan teknologi kebutuhan masyarakat. Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 menjelaskan pedoman pedoman dalam menerapkan kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dalam menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Dalam implementasi kurikulum merdeka, desentralisasi pendidikan menjadi kebutuhan sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan lingkungan internal sekolah dan lingkungan eksternal sekolah. Hal ini memberikan peluang sekolah lebih fleksibel dalam memberikan materi pembelajaran yang terkini dan sesuai dengan karakter peserta didik.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan model pembelajaran yang bervariasi. Hal ini memiliki sisi positif dari cara pembelajaran yang semakin optimal karena peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan kompetensi pembelajaran. Kurikulum merdeka belajar diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)

Nadiem Makarim sebagai hasil dari evaluasi dan penilaian untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya, kurikulum ini disebut sebagai Kurikulum Prototipe. Kurikulum prototipe merupakan pembelajaran yang lebih sederhana dengan menerapkan proyek yang sebelumnya tidak ada di kurikulum 2013. Kurikulum merdeka ditetapkan ketika Covid-19 sedang melanda dunia termasuk Indonesia dengan memiliki tujuan meningkatkan karakter yang baik dan juga *softskills* untuk menangani urgensi pada masa itu. Penerapan kurikulum merdeka mulai diimplementasikan di tahun 2022 dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa tidak hanya melalui bidang akademik tetapi melalui bidang non akademik dan keahlian yang dimiliki oleh peserta didik.

Kurikulum merdeka juga memudahkan guru untuk mengubah proses belajar menjadi lebih relevan sehingga, peserta didik dapat lebih menerima dengan mudah dalam memahami pembelajaran yang sudah diterapkan. Namun dalam penerapannya mengalami kendala dimana partisipasi masyarakat yang kurang sehingga proses pendidikan tidak sepenuhnya mencakup berbagai kalangan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak meratanya pendidikan adalah pandemi covid-19. Untuk mengatasi dampak pandemi, Kemendikbudristek melakukan perubahan kurikulum yang disebut sebagai kurikulum darurat untuk meminimalisasi kehambatan pembelajaran pada masa pademi. Hasil yang diperoleh, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat dapat dilihat hasilnya dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86%

(Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum darurat ini melatar belakangi implementasi kurikulum merdeka.

Efektivitas hasil kurikulum darurat semakin menguatkan bahwa penting untuk kurikulum mengalami perubahan rancangan dalam mengimplementasikan kurikulum secara lebih komprehensif. Secara komprehensif mengartikan bahwa perluasan yang harus mencakup sebagian besar mekanisme pendidikan dengan menerapkan kurikulum merdeka. Problematika yang terjadi di Indonesia itu kurang meratanya penyebaran pendidikan dan juga penerapan kurikulum yang tertinggal di daerah tertentu. Masalah tersebut bisa diatasi dari kebijakan masing masing daerah untuk melakukan evaluasi kinerja dalam memberikan solusi permasalahan pendidikan di daerah. Permasalahan yang terjadi bisa dikaitkan dengan partisipasi masyarakat yang kurang mendukung dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Kemendikbud menggunakan sistem Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai petunjuk untuk membandingkan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dijenjang tertentu dengan penduduk yang sudah bersekolah yang memenuhi syarat resmi sebagai penduduk usia sekolah. APK digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun data yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik di Kota Malang:

Tabel 1. 1 Angka Partisipasi Kasar di Kota Malang

Daerah Tempat Tinggal	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat Menurut Daerah Tempat Tinggal		
	2020	2021	2022
Perkotaan	88.17	88.73	88.70
Perdesaan	79.91	80.57	81.23
Perkotaan + Perdesaan	84.53	85.23	85.49

Sumber: Statistik Pendidikan 2016, BPS (Badan Pusat Statistik)

Dari data tersebut, disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat menurut data diterangkan bahwa tahun ke tahun mengalami peningkatan walau tidak signifikan tetapi adanya perubahan di setiap tahunnya. Perubahan ini menjadikan partisipasi masyarakat belum maksimal dalam penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan masih harus ditekankan kepada masyarakat agar pendidikan terus berkembang dan sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai konsep kurikulum yang lebih terbuka dan fleksibel, dengan pokok tujuan yang berfokus pada materi keunikan dibidang pelajaran tertentu serta melatih karakter dan kompetensi akademi peserta didik. Karakteristik yang menonjol dari kurikulum merdeka adalah mendukung pembelajaran dengan fokus pada materi sehingga pembelajaran yang dilakukan mendalami suatu materi kolaborasi, serta memberikan waktu luang lebih untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik melalui belajar kelompok seputar realita peristiwa dengan bentuk proyek dan, capaian pembelajaran setiap jam pelajaran yang fleksibel memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan.

Penerapan kurikulum merdeka juga sudah diimplementasikan di berbagai jenjang sekolah termasuk SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kabupaten Malang. Salah satu daerah yang diteliti oleh penulis termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang di lokasi SMA Negeri 1 Singosari. Daerah pedesaan memiliki data partisipasi masyarakat yang cukup baik dan cukup mendukung dalam keberlangsungan pendidikan sesuai dari hasil statistik BPS dalam konteks Angka Partisipasi Kasar (APK). Sebagai acuan dalam menentukan aspek penelitian mengenai perkembangan pendidikan di era desentralisasi yang berfokus pada pengembangan kurikulum merdeka untuk para pelajar di SMA Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang. SMA Negeri 1 Singosari juga memiliki tenaga kerja yaitu dari kepala sekolah, guru dan tenaga lain lain untuk menjalankan sistem operasional sekolah. Implementasi kebijakan pendidikan berhubungan dengan penerapan kurikulum merdeka, oleh karena itu, masing masing guru juga memiliki jabatan serta tupoksinya salah satu bertanggung jawab pada bidang kurikulum sekolah. Dari bidang kurikulum juga memiliki turunan koordinator untuk menangani setiap bagian bagian dari kurikulum contohnya kurikulum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Bimbingan Konseling (BK), dan juga penilaian.

Siswa sebagai stakeholder pendidikan menerima penerapan kurikulum merdeka dengan metode pembelajaran yang mengaitkan dengan merdeka belajar untuk memberikan suasana baru dan model pembelajaran yang unik. SMAN 1 Singosari memiliki banyak siswa sebagai murid yang menerima

kurikulum merdeka. Sebagian besar sudah menerima pengajaran yang bebas dan terarah dengan konsep merdeka belajar.

Tabel 1. 2 Data Siswa SMAN 1 Singosari Keseluruhan

Data Siswa	Jumlah Siswa
Laki-Laki	453 Siswa
Perempuan	724 Siswa
Total	1.177 Siswa

Sumber: [Sekolah Kita \(kemdikbud.go.id\)](http://Sekolah Kita (kemdikbud.go.id))

Dari data tersebut, SMAN 1 Singosari memiliki banyak murid yang sudah menerima pembelajaran berbasis merdeka belajar dan menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini secara langsung bermanfaat baik bagi siswa karena model pembelajaran yang bebas dan tidak terikat. Siswa mampu untuk menentukan bagaimana model belajarnya sendiri sehingga para siswa memiliki keluasan dalam berfikir secara kreatif dan inovatif. Manfaat utama dari penerapan kurikulum bagi siswa ini adalah menciptakan motivasi belajar. Salah satu penyebab siswa kurang menikmati proses belajar adalah rasa malas yang mengganggu siswa disetiap melakukan pembelajaran. Penyebab siswa kurang dalam akademik belajarnya juga dipengaruhi oleh lingkungan luar dan lingkungan dalam (Ivankaputri, 2021). Faktor lingkungan dalam meliputi hal-hal yang terjadi dalam diri siswa, seperti kurangnya motivasi, kepercayaan diri yang rendah, dan masalah kesehatan mental. Proses pembelajaran pada kurikulum merdeka mengatasi rasa malas dengan memotivasi diri siswa untuk belajar tanpa ada tekanan.

SMAN 1 Singosari sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan banyak pencapaian prestasi yang sudah diraih. Prestasi siswa menjadi bukti sebagai siswa yang termotivasi untuk peningkatan pendidikan dari segi akademik maupun non akademik. SMAN 1 Singosari juga termasuk dalam SMA Negeri terbaik di wilayah Kabupaten Malang (Aulia, 2023). Kualitas yang diberikan memberikan dampak positif bagi sekolah sampai mendapatkan predikat salah satu yang terbaik dari sekolah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat berbagai penjelasan yang menarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan kurikulum merdeka di SMAN 1 Singosari karena, SMAN 1 Singosari merupakan sekolah negeri pertama di wilayah singosari dan menjadi satu – satunya sekolah negeri di kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan jumlah siswa yang banyak dan menerima pembelajaran kurikulum merdeka sehingga, dari penelitian ini bisa memberikan contoh penerapan kurikulum merdeka dengan hambatan dan tantangan yang terjadi pada sistem pendidikan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022.

D. Manfaat

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang positif serta membangun untuk memecahkan masalah secara praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperluas pengalaman penulis dari berbagai masalah.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai saran pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi publik.